ABSTRAK

Penelitian berkaitan implementasi akuntansi akrual di entitas pemerintahan sudah dilakukan sejak tahun 1980an. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan permasalahan pada implementasi akuntansi akrual di entitas pemerintahan terutama di negara berkembang. Permasalahan tersebut antara lain menyatakan bahwa implementasi akuntansi akrual bukan dipicu oleh kebutuhan terhadap asas manfaat, tetapi lebih berupa paksaan, hegemoni, dan atau ikut-ikutan yang berakibat pada rendahnya kualitas pelaporan dan pemanfaatan informasi akrual.

Namun dalam konteks reformasi akuntansi akrual di Pemerintah Kota Semarang, ada fenomena yang unik untuk diungkap lebih mendalam. Keunikan terjadi karena Pemerintah Kota Semarang menerapkan akuntansi akrual sebelum ada peraturan atau standar yang mengamanatkan konsep akrual dalam pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini berusaha mengungkap lebih mendalam bagaimana para aktor di Pemerintah Kota Semarang memunculkan ide dan memaknai akuntansi akrual. Penelitian ini juga berusaha mengungkap bagaimana para aktor yang memiliki tujuan berbeda-beda bernegosiasi sepanjang proses reformasi akuntansi akrual.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif studi kasus. Data bersumber dari wawancara mendalam kepada 30 informan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan, prosedur, serta hasil pemeriksaan audit. Analisis data menggunakan teknik dan model paradigma *grounded theory* yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin hanya sampai tahap *axial coding*. Penelitian ini menggunakan model FMR Luder (2002) dan *negotiated order theory* sebagai lensa teori dalam proses abduktif pengategorian dan konstruksi hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemicu (*stimuli*) implementasi akrual di Pemerintah Kota Semarang adalah doktrin logika bisnis. Para aktor memiliki pemaknaan yang berbeda mengenai konsep akrual. Perbedaan pemahaman ini disebabkan karena masing-masing mengalami konteks interaksi yang berbeda sepanjang reformasi akuntansi akrual. Dalam berinteraksi, para aktor menggunakan tiga pola negosiasi, yaitu diskusi, peraturan, dan ketegasan pimpinan.

Kata kunci: akrual, pemerintah daerah, reformasi keuangan, stimuli, negosiasi